



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HERLINA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN APARATUR**
3. NHK : **248869**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.405.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/150 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 284 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah Seluas 1370 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 980 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 148 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **471.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



5. MOBIL, TOYOTA I KIJANG INOVA 2.0 V AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

6. MOTOR, HONDA FIC AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 979.708.802

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.905.108.802

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.905.108.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.